



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN **DPRD KOTA YOGYAKARTA**

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERHASIL DITETAPKAN

Jembatani Aspirasi Warga Jadi Prioritas Kegiatan



Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudyatmoko.



Ketua Pansus Pokok Pikiran Dewan Tri Waluko Widodo.



Penetapan keputusan pokok pikiran dewan oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Seiring tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kota Yogyakarta yang memasuki tahap akhir, lembaga legislatif juga berhasil menuntaskan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Melalui pokok-pokok pikiran dewan tersebut, aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat akan dijawab menjadi prioritas kegiatan untuk segera direalisasikan.

Penetapan surat keputusan mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta diagendakan melalui rapat paripurna pada Rabu (13/3) lalu. Dalam sidang tertinggi di level legislatif tersebut, seluruh peserta telah sepakat untuk segera diputuskan. "DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," ungkap Ketua DPRD Kota Yogyakarta H. Danang Rudyatmoko, Kamis (14/3).

Sesuai mekanisme, RKPD disusun berdasarkan asas prioritas pembangunan. Kerangka utamanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Aspirasi masyarakat juga turut diserap melalui tahapan musrenbang sejak di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta yang mencapai 45 kelurahan, sudah menyelesaikan musrenbang. Hasilnya lantas diajukan dalam musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kota untuk kemudian dijadikan landasan penyusunan RKPD.

Tahapan musrenbang tersebut menjadi ranah eksekutif atau pemerintah daerah. Sedangkan lembaga legislatif sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan juga memiliki peran yang sama berupa penjangkauan aspirasi. Selama ini penjangkauan aspirasi secara resmi dilakukan melalui agenda reses. "Pokok pikiran dewan ini hampir semuanya kami rangkum berdasarkan hasil dari kegiatan reses.

Dalam setahun ada beberapa kali reses sebagai ajang bagi wakil rakyat untuk bertemu konstituen. Di sana anggota dewan mendengarkan masukan dan aspirasi sekaligus memaparkan program yang akan bergulir," urai Danang.

Aspirasi yang disampaikan oleh konstituen lantas disaring berdasarkan kelompok kegiatan. Mulai dari urusan masalah, lokasi, OPD teknis, volume, kebutuhan anggaran hingga jenis atau sub kegiatan. Bahkan guna mempertegas fungsi tersebut dibentuk panitia khusus (pansus) terkait penyusunan pokok pikiran dewan. Total ada 13 anggota pansus yang diketuai oleh Tri Waluko Widodo.

Danang menyebut, hasil kinerja pansus sudah ia terima sejak pekan lalu. Total ada 352 jenis usulan masyarakat yang dirangkum dalam pokok pikiran dewan. Setiap anggota dewan sebetulnya tidak dibatasi untuk menyampaikan usulan konstituen agar dimasukkan dalam pokok pikiran dewan. Hal ini karena setiap masyarakat yang menjadi konstituen anggota dewan berhak untuk menyampaikan usulan dan masukan bagi pengembangan di wilayahnya masing-masing. "Di beberapa daerah bahkan pokok pikiran dewan bisa mencapai ribuan usulannya. Tetapi kita hanya sekitar 352 usulan. Semoga apa yang sudah berjalan ini sesuai dengan harapan masyarakat sehingga usulan yang disampaikan juga menjadi prioritas untuk difasilitasi," ungkapnya.

Setelah pokok pikiran dewan ditetapkan, selanjutnya disampaikan ke tim eksekutif guna menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Harapannya setiap usulan masyarakat tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyaluran rencana kegiatan yang diakomodasi oleh pemerintah.

Sementara Ketua Pansus Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menyebut 352 usulan yang telah disusun jenisnya cukup beragam. Tidak semua merupakan usulan dalam bentuk fisik melainkan banyak pula yang sifatnya

justru untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di kampung. "Kalau yang sifatnya fisik biasanya seperti pemeliharaan saluran air hujan, penambahan CCTV publik dan pemasangan cermin cembung di tiap kampung. Itu merupakan kebutuhan yang sehari-hari memang dihadapi oleh masyarakat ketika beraktivitas di wilayah," jelasnya.

Munculnya usulan tersebut bukan lantas program pemerintah selama ini tidak menjangkau, melainkan lokasi sasaran bisa jadi belum merata. Ditambah, aktivitas masyarakat di kampung atau wilayah semakin tinggi sehingga membutuhkan sarana pendukung. Oleh karena itu, dirinya juga berharap usulan-usulan yang sifatnya kebutuhan di wilayah bisa menjadi prioritas untuk dipenuhi.

Di samping itu, Widodo, mengaku justru banyak usulan yang berupa pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia. Mulai dari pelatihan digital marketing, pelatihan pembuatan kue atau boga, pelatihan manajemen UMKM, pelatihan satpam dan lain sebagainya. Ada pula usulan agar perpustakaan keliling menjangkau hingga kampung karena banyaknya masyarakat yang sangat menantikan kehadirannya.

Kendati demikian, pokok pikiran dewan yang telah ditetapkan kali ini baru bisa diakomodasi pada tahun anggaran 2025. Hal ini karena ada mekanisme atau pentahapan dalam penyusunan dokumen anggaran negara. Program dan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah pada tahun ini pun merupakan hasil musrenbang maupun pokok pikiran dewan yang diputuskan tahun lalu. "Jadi hasil pokok pikiran dewan ini akan masuk dalam pertimbangan RKPD 2025. Pemkot sudah menyelesaikan musrenbang wilayah, dan kami pun juga telah merampungkan penjangkauan aspirasi. Hasil musrenbang dan jaring aspirasi atau pokok pikiran dewan ini, lantas akan disandingkan untuk masuk dalam RKPD 2025," urainya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005